

Dinamika Harmonisasi Sosial Antara Warga Transmigran Jawa dan Masyarakat Lokal di Nagari Banai

Salman Al Habsi Lubis

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang

Correspondence Email : habsilubis27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses interaksi dan integrasi sosial antara pendatang transmigran dengan masyarakat lokal di Nagari Banai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua kelompok tersebut dapat menciptakan keseimbangan sosial melalui berbagai mekanisme adaptasi, negosiasi budaya, dan pembangunan hubungan sosial yang harmonis. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi sosial terjadi melalui sejumlah dinamika seperti pengakuan terhadap perbedaan budaya, kolaborasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta peran aktif tokoh masyarakat dalam memediasi konflik dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Faktor tantangan seperti perbedaan norma, stereotip, dan ketimpangan ekonomi juga ditemukan, namun dapat dikelola melalui komunikasi yang terbuka dan upaya bersama untuk membangun rasa saling pengertian. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dan dialog interkultural sebagai strategi utama dalam memperkuat kohesi sosial antara warga transmigran dan masyarakat lokal di Nagari Banai, sehingga tercipta masyarakat yang damai dan berkelanjutan.

Kata kunci: Harmonisasi Sosial, Interaksi Sosial, Transmigrasi.

Abstrack

This study examines the process of social interaction and integration between transmigrant newcomers and the local community in Nagari Banai. The study aims to understand how these two groups can create social balance through various mechanisms of adaptation, cultural negotiation, and the development of harmonious social relationships. The method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, participatory observation, and document studies. The research findings indicate that social harmonization occurs through a number of dynamics such as recognition of cultural differences, collaboration in economic and social activities, and the active role of community leaders in mediating conflicts and strengthening the values of togetherness. Challenges such as differences in norms, stereotypes, and economic disparities were also found, but they can be managed through open communication and joint efforts to build mutual understanding. The research conclusion emphasizes the importance of an inclusive approach and intercultural dialogue as key strategies in strengthening social cohesion between transmigrant residents and the local community in Nagari Banai, thereby creating a peaceful and sustainable society.

Keyword: Social Harmony, Social Interaction, Transmigration.

PENDAHULUAN

Program transmigrasi merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang sejak lama dirancang untuk mengatasi ketimpangan distribusi penduduk serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Salah satu contohnya adalah Nagari Banai, yang menjadi lokasi penempatan transmigran dari daerah padat ke daerah yang relatif kurang penduduk. Transmigrasi tidak hanya bertujuan menyediakan ruang hidup baru bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga transmigran sekaligus mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan (Nova, 2016). Dengan demikian, transmigrasi menjadi instrumen penting dalam kebijakan pembangunan terintegrasi yang menghubungkan aspek demografi, ekonomi, dan sosial budaya.

Perpindahan penduduk melalui transmigrasi membawa konsekuensi sosial yang cukup kompleks, terutama dalam konteks interaksi antara transmigran dan masyarakat lokal. Kedua kelompok memiliki latar belakang budaya, adat istiadat, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda, sehingga berpotensi melahirkan gesekan maupun konflik. Namun, perbedaan tersebut juga membuka peluang untuk membangun jembatan interaksi sosial yang produktif menuju keharmonisan bersama (Anggraini, 2019). Dengan kata lain, transmigrasi tidak hanya menyangkut mobilitas fisik, tetapi juga merupakan proses transformasi sosial yang menuntut adanya pengelolaan perbedaan secara bijak agar tercapai integrasi sosial yang stabil.

Nagari Banai menjadi contoh menarik mengenai dinamika sosial yang lahir dari kebijakan transmigrasi. Di wilayah ini, proses harmonisasi antara warga lokal dengan transmigran berlangsung melalui pencarian titik temu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dari latar belakang berbeda berupaya membangun pola hubungan sosial yang saling melengkapi, sehingga terbentuk fondasi kebersamaan yang mendukung pembangunan lokal. Harmonisasi sosial di sini menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat kohesi masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah (Nova, 2016).

Berbeda dengan beberapa daerah transmigrasi lain yang kerap menghadapi konflik akibat perebutan lahan atau benturan nilai budaya, Nagari Banai menunjukkan capaian integrasi sosial yang relatif kondusif. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran strategis tokoh masyarakat, lembaga adat, dan elite lokal yang menjadi mediator dalam menyelesaikan perbedaan. Melalui forum dialog dan mekanisme musyawarah, potensi konflik yang muncul dapat dikelola sehingga tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka. Peran aktor sosial ini memperlihatkan bahwa harmoni tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari proses negosiasi sosial yang berkesinambungan (Anggraini, 2019).

Mekanisme harmonisasi sosial yang terbentuk di Nagari Banai berjalan melalui pengakuan atas keragaman budaya, kerja sama dalam bidang ekonomi, serta penciptaan nilai kebersamaan yang inklusif. Warga transmigran belajar menyesuaikan diri dengan tradisi lokal Minangkabau, sementara masyarakat setempat menunjukkan sikap keterbukaan terhadap praktik budaya baru yang dibawa transmigran. Interaksi timbal balik ini melahirkan identitas sosial baru yang dinamis, di mana nilai-nilai lokal dan unsur-unsur budaya pendatang saling menyatu tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa integrasi sosial dapat dicapai melalui kombinasi antara adaptasi, kompromi, dan penerimaan perbedaan (Nova, 2016).

Meski banyak penelitian sebelumnya menekankan problematika transmigrasi, seperti konflik sosial, ketimpangan ekonomi, atau isu marginalisasi, kajian mengenai bagaimana harmonisasi sosial dibangun masih relatif terbatas. Penelitian terhadap kasus Nagari Banai memberikan kontribusi baru dalam memperluas perspektif tentang transmigrasi, khususnya dengan menyoroti dimensi adaptasi budaya, negosiasi sosial, dan strategi komunikasi antar kelompok. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memaparkan tantangan, tetapi juga menghadirkan model praksis bagaimana interaksi multietnik dapat diarahkan menuju koeksistensi yang damai (Anggraini, 2019).

Latar belakang penelitian ini juga semakin relevan karena masyarakat Nagari Banai memiliki karakteristik multietnik yang unik. Transmigran membawa tradisi dan sistem nilai di daerah asalnya yang berbeda dengan budaya lokal Minangkabau. Perbedaan tersebut menghadirkan tantangan dalam menjaga kohesi sosial, tetapi sekaligus menjadi peluang untuk menciptakan ruang interaksi budaya yang memperkaya identitas sosial masyarakat. Dengan kata lain, Nagari Banai merefleksikan laboratorium sosial Dimana multikulturisme dan integrasi sosial diuji dalam praktik kehidupan sehari-hari (Anggraini, 2019).

Berdasarkan konteks tersebut, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis dinamika harmonisasi sosial antara warga transmigran dan masyarakat lokal di Nagari Banai. Analisis diarahkan pada faktor-faktor yang mendukung terbangunnya harmoni, kendala yang masih dihadapi, serta solusi yang dikembangkan masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan. Fokus penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif tentang praktik harmonisasi sosial di tingkat lokal, yang dapat menjadi model bagi pengelolaan daerah transmigrasi lainnya (Nova, 2016).

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada kajian interaksi sosial, peran tokoh masyarakat dan lembaga adat, serta strategi adaptasi budaya yang ditempuh oleh kedua kelompok. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai sosial terbentuk, dinegosiasikan, dan direproduksi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, gambaran mengenai kehidupan sosial masyarakat multietnik di Nagari Banai dapat dipahami secara utuh, baik dari segi tantangan maupun keberhasilannya (Anggraini, 2019).

Dari sisi regulasi, pelaksanaan program transmigrasi di Indonesia saat ini memiliki dasar hukum yang kuat. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Selain itu, Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang kerja sama antar pemerintah daerah dalam pelaksanaan program transmigrasi, yang bertujuan memperkuat efektivitas tata kelola program tersebut (Permen Transmigrasi No.1/2025). Regulasi ini menegaskan bahwa transmigrasi bukan hanya proyek sosial, tetapi juga bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada kepastian hukum.

Lebih jauh lagi, Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 mengatur mekanisme penanaman modal dan tata cara pemberian izin investasi di kawasan transmigrasi. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dalam mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat transmigran. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, aspek sosial dan ekonomi transmigrasi

dapat berjalan secara harmonis dan saling melengkapi dalam memperkuat pembangunan wilayah (Permen Transmigrasi No.3/2025).

Dengan demikian, transmigrasi di Nagari Banai tidak hanya dipahami sebagai perpindahan fisik penduduk, melainkan sebagai sebuah proses sosial yang kompleks dan berkelanjutan. Keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk membangun integrasi budaya, menjalin kerja sama sosial-ekonomi, serta memanfaatkan regulasi sebagai landasan dalam pengelolaan perbedaan. Hal ini memperlihatkan bahwa harmoni sosial di daerah transmigrasi bukanlah hasil yang instan, melainkan proses kolektif yang memerlukan kesadaran, partisipasi, dan pengelolaan yang terarah demi terwujudnya masyarakat yang inklusif, produktif, dan sejahtera.

LITERATURE REVIEW

Harmonisasi sosial antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Nagari Banai merupakan fenomena sosial yang kompleks dan menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologis dan antropologis. Berdasarkan teori kohesi sosial (*social cohesion*) yang dikemukakan oleh (Putnam, 2000), hubungan antar-komunitas akan berjalan harmonis apabila dilandasi oleh kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang kuat. Proses ini juga sejalan dengan teori *contact hypothesis* dari (Allport, 1954) yang menegaskan bahwa interaksi langsung antar-kelompok dapat mengurangi prasangka apabila dilakukan dalam situasi setara dan didukung oleh institusi sosial. Dalam konteks transmigrasi, teori akulturasi (Berry, 1997) menjelaskan bahwa proses adaptasi budaya antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal dapat menghasilkan pola integrasi yang berbeda tergantung pada sejauh mana kedua kelompok mampu menyesuaikan diri terhadap sistem sosial dan nilai budaya yang berlaku. Kebijakan transmigrasi yang awalnya dirancang untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah justru menimbulkan dinamika sosial baru, di mana perbedaan nilai, sistem kekerabatan, dan kepemilikan lahan menjadi faktor penentu keberhasilan integrasi sosial.

Dalam konteks Sumatera Barat, khususnya di Nagari Banai, hubungan antara transmigran Jawa dan masyarakat lokal Minangkabau mencerminkan proses adaptasi sosial yang berlangsung secara bertahap. Struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan sistem adat dan kepemilikan tanah ulayat sering kali menimbulkan tantangan bagi transmigran yang membawa konsep kepemilikan individu. Namun, penelitian menunjukkan bahwa interaksi ekonomi melalui kerja sama pertanian, perdagangan, dan kegiatan sosial seperti gotong royong serta kegiatan keagamaan dapat memperkuat ikatan sosial antar-kelompok (RAMADANI, n.d.). Meskipun masih ditemukan perbedaan budaya dan potensi konflik, peran pemerintah nagari serta lembaga adat sebagai mediator sosial terbukti mampu menciptakan ruang dialog dan menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, studi tentang dinamika harmonisasi sosial di Nagari Banai menjadi penting untuk memahami bagaimana dua komunitas dengan latar belakang budaya berbeda dapat membangun integrasi sosial yang berkelanjutan di tengah keberagaman sistem nilai lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika harmonisasi sosial antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Nagari Banai. Lokasi dipilih karena memiliki karakteristik multietnik dan

menunjukkan integrasi sosial yang relatif harmonis dibandingkan daerah transmigrasi lain. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat nagari, serta warga transmigran dan masyarakat lokal, ditambah observasi partisipatif terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, peraturan terkait transmigrasi, laporan nagari, serta literatur akademik.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas dijaga dengan triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai proses harmonisasi sosial, faktor pendukung dan kendalanya, serta implikasinya bagi pembangunan masyarakat multikultural di Nagari Banai.

PEMBAHASAN

Sejarah Transmigrasi di Nagari Banai

Sejarah transmigrasi di Nagari Banai berakar dari kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan memindahkan sebagian warga ke daerah-daerah yang relatif jarang penduduknya di luar Jawa. Sejak awal abad ke-20, gagasan transmigrasi telah dipandang sebagai salah satu instrumen pembangunan nasional, terutama dalam rangka membuka kawasan baru yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Wilayah Sumatera Barat, termasuk Nagari Banai, menjadi salah satu lokasi yang dipilih karena ketersediaan lahan yang luas serta peluang pengembangan sektor agraris. Dengan demikian, program transmigrasi bukan hanya dimaknai sebagai kebijakan kependudukan semata, melainkan juga sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan nasional dan pemerataan pembangunan antar wilayah (Rustiadi & Junaidi, 2011).

Proses transmigrasi di Nagari Banai merupakan bagian dari gelombang perpindahan yang telah dimulai sejak masa kolonial Belanda dan kemudian dilanjutkan pada era Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk membuka daerah terpencil, meningkatkan akses pembangunan, serta mengurangi tekanan demografi di Pulau Jawa. Mayoritas transmigran berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, membawa serta identitas budaya, sistem pertanian, dan pola kehidupan khas daerah asal mereka. Kehadiran kelompok pendatang ini tidak hanya menandai proses mobilitas geografis, tetapi juga memunculkan interaksi sosial-budaya yang kompleks dengan masyarakat lokal Minangkabau yang telah mendiami Nagari Banai secara turun-temurun (May, 2006).

Gelombang kedatangan transmigran ke Nagari Banai berlangsung secara bertahap, terutama pada periode 1980-an hingga awal 1990-an, ketika pemerintah secara aktif memfasilitasi penempatan mereka melalui penyediaan lahan pertanian, perumahan, serta sarana penunjang lainnya. Peristiwa ini menandai awal mula integrasi sosial antara warga transmigran dengan masyarakat lokal, yang memiliki latar belakang budaya dan sistem sosial berbeda. Proses integrasi ini bukan sekadar perpindahan penduduk secara fisik, melainkan juga mengandung dimensi sosial yang menuntut adanya penyesuaian, baik dari pihak transmigran maupun masyarakat setempat, dalam membangun relasi sosial yang harmonis.

Dari sisi administratif, Nagari Banai yang merupakan bagian dari sistem nagari di Sumatera Barat, menghadapi dinamika sosial yang cukup kompleks akibat hadirnya komunitas baru. Transmigrasi di wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan redistribusi penduduk dan penataan wilayah, melainkan juga menyangkut proses adaptasi budaya, pergeseran pola interaksi sosial, serta pembentukan tatanan kehidupan bersama antara dua kelompok masyarakat yang memiliki latar budaya berbeda. Dengan demikian, program transmigrasi di Nagari Banai dapat dipandang sebagai laboratorium sosial yang memperlihatkan bagaimana kebijakan negara berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat adat.

Pemilihan Nagari Banai sebagai salah satu lokasi transmigrasi tidak terlepas dari pertimbangan strategis pemerintah, khususnya terkait ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas serta prospek pengembangan ekonomi lokal. Wilayah ini dinilai potensial untuk pengembangan tanaman pangan maupun komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit, yang pada masa itu dipandang sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional. Kehadiran transmigran diharapkan dapat memperkuat basis produksi pertanian sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung agenda pembangunan jangka panjang negara.

Warga transmigran Jawa membawa tradisi bertani yang berbeda dari praktik pertanian masyarakat Minangkabau di Nagari Banai. Jika masyarakat Minangkabau lebih banyak mengandalkan sistem pertanian tradisional yang terikat dengan adat dan pola kekerabatan, para transmigran Jawa cenderung mengedepankan pola intensifikasi pertanian dengan keterampilan teknis yang diwariskan dari daerah asal. Perbedaan tersebut mendorong adanya proses adaptasi dan pembelajaran timbal balik, sehingga kedua kelompok masyarakat dapat saling melengkapi dalam praktik pengelolaan sumber daya pertanian. Interaksi ini pada gilirannya melahirkan bentuk baru dari keragaman agraris yang memperkaya dinamika sosial-ekonomi lokal.

Penyesuaian budaya antara transmigran Jawa dan masyarakat Minangkabau berlangsung secara bertahap melalui interaksi sosial sehari-hari. Transmigran berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai adat nagari, terutama dalam praktik musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap aturan adat yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat Minangkabau juga membuka ruang bagi pendatang untuk ikut serta dalam kehidupan sosial, meskipun dengan tetap mempertahankan otoritas adat. Proses ini menjadi titik temu yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat bersinergi dengan budaya pendatang demi menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat.

Dalam proses integrasi tersebut, peran pemerintah setempat serta tokoh masyarakat sangat signifikan.

Mereka berperan sebagai mediator yang menjembatani perbedaan, baik melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, maupun melalui penyelenggaraan kegiatan sosial yang melibatkan kedua kelompok. Kehadiran program pembangunan yang inklusif tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menciptakan basis kerjasama ekonomi yang mampu menopang keberlanjutan kehidupan komunitas di Nagari Banai. Dengan demikian, harmonisasi sosial yang terbentuk bukanlah proses yang berlangsung secara alamiah, melainkan hasil dari rekayasa sosial yang dirancang secara sadar.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan seperti perbedaan bahasa, adat, dan kebiasaan sehari-hari, baik transmigran maupun masyarakat lokal berhasil membangun ruang

kebersamaan yang sinergis. Dinamika sosial ini memperlihatkan bahwa konflik potensial yang muncul akibat perbedaan dapat diminimalisasi melalui interaksi, dialog, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kasus Nagari Banai menjadi contoh penting bagaimana keberagaman etnis dapat dikelola secara konstruktif sehingga menghasilkan harmoni sosial yang relatif stabil di wilayah transmigrasi (Suyatno, 2025).

Dengan demikian, sejarah transmigrasi di Nagari Banai tidak dapat dilihat hanya sebagai perpindahan penduduk, tetapi sebagai proses historis yang melibatkan transformasi identitas sosial, ekonomi, dan budaya. Kehidupan bersama antara masyarakat Jawa dan Minangkabau membentuk identitas kolektif baru yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya keduanya. Dokumentasi sejarah ini menjadi penting bukan hanya sebagai catatan akademik, tetapi juga sebagai rujukan praktis dalam memahami dinamika harmonisasi sosial di daerah transmigrasi lain, sekaligus memperkaya diskursus tentang pembangunan, pluralitas budaya, dan integrasi sosial di Indonesia.

Profil Sosial Budaya Masyarakat Nagari Banai

Nagari Banai merupakan salah satu wilayah adat yang terletak di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan karakteristik sosial budaya yang khas dan sarat nilai tradisional. Sebagian besar masyarakatnya berasal dari etnis Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, dimana garis keturunan ditarik melalui pihak ibu. Pola kekerabatan ini tidak hanya berfungsi dalam konteks keluarga, tetapi juga mengatur kepemilikan harta pusaka, pola pewarisan, serta posisi sosial di dalam masyarakat. Kehidupan sehari-hari masyarakat Banai ditandai oleh aktivitas kolektif seperti gotong royong, pengajian, dan kegiatan keagamaan, yang sekaligus memperlihatkan keterikatan mereka pada nilai adat dan ajaran Islam sebagai fondasi kehidupan sosial (Sumatera et al., 1993).

Kehidupan sosial masyarakat Nagari Banai diikat oleh norma adat yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur tata kelola kehidupan bersama. Sistem pemerintahan nagari yang dipimpin oleh ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai menunjukkan adanya perpaduan antara struktur adat dan otoritas moral. Ninik mamak sebagai tokoh adat memegang peranan sentral dalam menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik internal, dan menegakkan aturan adat yang diwariskan turun-temurun. Dengan demikian, pemerintahan nagari tidak hanya berperan sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai simbol kontinuitas tradisi yang menjaga harmoni sosial di tengah perubahan zaman.

Dari segi ekonomi, masyarakat lokal Nagari Banai sangat bergantung pada sektor agraris. Pertanian padi, perkebunan kelapa sawit, serta tanaman pangan lain seperti jagung dan singkong menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi ini erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah Banai yang memiliki lahan subur dan cocok untuk kegiatan budidaya. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Nagari Banai senantiasa dihubungkan dengan upaya memperbaiki aksesibilitas dan meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat setempat (Irmandes, 2025).

Kehadiran warga transmigran Jawa di Nagari Banai menambah kompleksitas sosial budaya masyarakat setempat. Para transmigran ini berasal dari berbagai daerah pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan latar belakang kuat pada tradisi pertanian, khususnya budidaya padi dan palawija. Mereka membawa serta budaya, bahasa, dan sistem sosial khas

Jawa yang berbeda dengan masyarakat Minangkabau. Kehidupan sehari-hari transmigran diwarnai oleh usaha mempertahankan identitas budaya asal, sekaligus berupaya menyesuaikan diri dengan norma dan nilai lokal. Proses adaptasi ini memperlihatkan dinamika akulturasi budaya yang secara perlahan membentuk ruang sosial baru di Nagari Banai.

Bahasa menjadi salah satu penanda utama perbedaan identitas antara warga lokal dan transmigran. Masyarakat Minangkabau menggunakan bahasa daerah mereka dalam komunikasi sehari-hari, sementara warga Jawa lebih sering menggunakan bahasa Jawa di lingkungan internal komunitasnya. Meski demikian, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai *lingua franca* yang memfasilitasi interaksi antar kedua kelompok. Intensitas pergaulan dalam aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi secara bertahap melahirkan bentuk komunikasi yang lebih cair, termasuk penggunaan bahasa campuran sebagai strategi adaptasi dalam interaksi lintas budaya.

Interaksi sosial yang terbentuk antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal Minangkabau berlangsung dalam berbagai ranah kehidupan, baik pada kegiatan sosial, keagamaan, maupun acara adat. Aktivitas seperti kerja bakti, perayaan tradisi, hingga kegiatan keagamaan bersama menjadi sarana untuk mempertemukan dua kelompok budaya yang berbeda. Melalui aktivitas kolektif ini, terbentuk proses harmonisasi sosial yang ditandai oleh tumbuhnya saling pengertian, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya. Interaksi ini tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga berperan sebagai jembatan dalam memperkuat kohesi sosial antar komunitas (Firma, 2025).

Di tengah upaya integrasi tersebut, masyarakat transmigran tetap berusaha melestarikan budaya asal mereka, misalnya melalui penyelenggaraan tradisi selamatan ketika datangnya 1 Muharram, pertunjukan kuda kepang/kuda lumping, atau upacara adat Jawa lainnya. Kegiatan tersebut sering kali juga dihadiri oleh masyarakat lokal, sehingga tercipta ruang toleransi dan pengakuan sosial terhadap keberadaan budaya baru. Sebaliknya, masyarakat Minangkabau mempertahankan adat istiadat mereka dalam bentuk perayaan *alek nagari* dan kegiatan adat lainnya. Kehadiran dua budaya yang berbeda ini tidak menimbulkan segregasi, melainkan memperkaya mozaik sosial budaya Nagari Banai (Novendra, 2025).

Islam sebagai agama mayoritas bagi kedua kelompok masyarakat memainkan peran penting sebagai faktor pemersatu. Masjid dan surau berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pengajian. Melalui wadah keagamaan ini, nilai ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam) ditegakkan dan menjadi fondasi dalam memperkuat solidaritas sosial. Dengan demikian, agama berperan sebagai perekat utama yang mengatasi perbedaan etnis dan budaya, sekaligus mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih harmonis.

Seiring dengan interaksi yang intensif, terjadi perubahan sosial budaya yang bersifat mutual. Norma baru muncul melalui proses kompromi budaya, misalnya penggunaan bahasa campuran dalam komunikasi, adaptasi gaya berpakaian, serta pola interaksi sosial yang lebih terbuka dan inklusif. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya berarti penggabungan budaya, tetapi juga transformasi nilai-nilai sosial yang menghasilkan bentuk kehidupan baru yang disepakati bersama. Perubahan tersebut menjadi bukti nyata adanya proses dialektika sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banai.

Namun demikian, dinamika sosial budaya yang terjadi tidak sepenuhnya berlangsung tanpa hambatan. Perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan terkadang memunculkan potensi

konflik, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan dalam bidang ekonomi atau praktik budaya. Dalam konteks ini, peran tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah lokal menjadi sangat penting sebagai mediator dan fasilitator. Melalui mekanisme musyawarah dan mediasi, konflik yang muncul dapat dikelola dan diselesaikan, sehingga konsensus sosial tetap terjaga dan kehidupan bersama dapat berjalan dengan damai.

Secara keseluruhan, profil sosial budaya Nagari Banai menggambarkan realitas kehidupan masyarakat yang kompleks, dinamis, sekaligus harmonis. Kehadiran transmigran Jawa dan interaksinya dengan masyarakat Minangkabau memperlihatkan proses panjang adaptasi, negosiasi budaya, serta pembentukan norma sosial baru. Harmoni yang terwujud merupakan hasil dari sikap saling menghargai, keterbukaan, dan kemampuan membangun konsensus di tengah perbedaan. Dengan demikian, Nagari Banai dapat dijadikan contoh empiris tentang bagaimana pluralitas etnis dan budaya dapat dikelola untuk menciptakan kehidupan bersama yang produktif dan damai.

Dinamika Interaksi Sosial

Interaksi sosial antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Nagari Banai mencerminkan suatu perjalanan sosial yang dinamis dari awalnya penuh jarak menuju terbentuknya harmoni. Perbedaan budaya, bahasa, dan pola hidup yang melekat pada masing-masing komunitas menjadi faktor yang membentuk dinamika tersebut. Kondisi ini menuntut adanya proses adaptasi, pemahaman, dan penerimaan timbal balik sehingga keberagaman tidak melahirkan segregasi, melainkan dapat dikelola menjadi kekuatan sosial untuk membangun kebersamaan. Dalam kerangka teori interaksi sosial, fenomena ini sejalan dengan pandangan bahwa hubungan sosial selalu terbentuk melalui proses negosiasi dan penyesuaian yang berkelanjutan.

Pada tahap awal kedatangan, interaksi antara warga transmigran dan masyarakat lokal cenderung bersifat formal dan terbatas. Hal ini dapat dipahami karena perbedaan adat istiadat, kebiasaan hidup, serta hambatan komunikasi yang menimbulkan jarak sosial-kultural. Masyarakat lokal cenderung berhati-hati dalam menerima kelompok pendatang, sementara transmigran sendiri berusaha menempatkan diri di tengah aturan adat yang belum mereka kuasai. Situasi ini menggambarkan adanya fase *in-group* dan *out-group* sebagaimana dijelaskan oleh teori sosiologi klasik, di mana hubungan antar kelompok baru berkembang ketika terdapat ruang interaksi yang intensif.

Seiring berjalannya waktu, interaksi sosial mulai tumbuh melalui ruang-ruang kolektif yang mempertemukan kedua komunitas. Kegiatan gotong royong dalam pembangunan infrastruktur, pengajian rutin di masjid, serta partisipasi dalam perayaan adat nagari menjadi jembatan yang mempertemukan masyarakat lokal dan transmigran. Aktivitas-aktivitas bersama ini berfungsi sebagai *social glue* yang menumbuhkan solidaritas, memperkuat rasa kebersamaan, sekaligus mengikis prasangka antar kelompok. Dengan kata lain, interaksi ini tidak hanya mempererat hubungan sosial, tetapi juga membentuk pola kohesi yang menjadi dasar terciptanya harmoni sosial di Banai.

Namun, proses interaksi ini tidak berlangsung secara linier tanpa hambatan. Sejarah sosial di Nagari Banai mencatat adanya konflik ringan yang pernah terjadi antara warga transmigran dengan masyarakat lokal, misalnya terkait penggunaan akses jalan oleh mobil besar pengangkut kayu yang melintasi pemukiman transmigran. Persoalan tersebut

memunculkan ketegangan karena dianggap mengganggu aktivitas sehari-hari warga transmigran. Kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan ekonomi dan pemanfaatan ruang sering kali menjadi pemicu gesekan sosial dalam masyarakat yang plural (Suyatno, 2025).

Meski sempat menimbulkan ketidaknyamanan, konflik tersebut berhasil dikelola dengan pendekatan musyawarah. Dialog terbuka antara perwakilan transmigran, masyarakat lokal, serta pihak tokoh adat dan pemerintah desa menghasilkan solusi yang dapat diterima bersama. Pilihan menggunakan musyawarah memperlihatkan kedewasaan sosial masyarakat Banai, yang mengutamakan nilai mufakat dan harmoni dalam penyelesaian masalah. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa mekanisme resolusi konflik berbasis kearifan lokal tetap relevan dalam mengelola dinamika sosial masyarakat majemuk (Suyatno, 2025).

Musyawarah tersebut memperlihatkan peran sentral aktor-aktor sosial seperti ninik mamak, kepala desa, serta tokoh masyarakat dalam menjembatani perbedaan kepentingan. Kehadiran mereka sebagai mediator bukan hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga menjaga legitimasi sosial proses penyelesaian konflik. Kesepakatan yang dihasilkan bersifat win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Model penyelesaian seperti ini menunjukkan bahwa struktur sosial berbasis adat dan musyawarah dapat berfungsi sebagai instrumen efektif dalam meredam potensi konflik horizontal (Andi, 2025).

Kasus konflik ringan yang terselesaikan ini kemudian menjadi pembelajaran kolektif bagi masyarakat Banai. Mereka menyadari bahwa perbedaan, jika tidak dikelola dengan komunikasi terbuka, berpotensi memicu gesekan. Namun, jika diselesaikan dengan musyawarah, perbedaan justru dapat menjadi ruang pembelajaran sosial. Dengan demikian, pengalaman ini memperkuat komitmen warga untuk terus menempatkan dialog dan konsensus sebagai mekanisme utama dalam menjaga keharmonisan sosial.

Selain mekanisme penyelesaian konflik, integrasi sosial juga diperkuat melalui ikatan perkawinan antar etnis. Perkawinan campuran antara warga transmigran Jawa dan masyarakat Minangkabau berfungsi sebagai jembatan sosial yang efektif dalam memperkecil jarak kultural. Melalui perkawinan, terbentuk jaringan kekerabatan baru yang menghubungkan dua komunitas, memperdalam interaksi, dan mempercepat proses akulturasi budaya. Fenomena ini sejalan dengan teori asimilasi yang menyatakan bahwa interaksi sosial jangka panjang dapat melahirkan integrasi budaya yang lebih kokoh (Firma, 2025).

Pada aspek ekonomi, kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan menjadi titik temu penting dalam hubungan sosial antar komunitas. Warga transmigran yang umumnya menggarap sawit dan padi menjalin hubungan saling ketergantungan dengan masyarakat lokal dalam produksi maupun pemasaran hasil pertanian. Relasi ekonomi yang simbiosis ini tidak hanya memperkuat interaksi sosial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, interaksi ekonomi menjadi fondasi material yang menopang proses integrasi sosial.

Dinamika sosial ini juga berimplikasi pada berkurangnya stereotip dan prasangka yang sebelumnya mungkin tumbuh antara kedua kelompok. Interaksi yang berkesinambungan mendorong tumbuhnya rasa saling percaya dan solidaritas. Identitas sosial yang awalnya terpisah perlahan mencair, digantikan dengan kesadaran kolektif bahwa mereka adalah bagian dari satu komunitas Nagari Banai. Proses ini memperlihatkan bagaimana interaksi sosial berperan dalam membangun *social capital* yang memperkuat kohesi masyarakat.

Kendati demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait perbedaan bahasa, adat, dan kebiasaan yang masih melekat pada masing-masing komunitas. Tanpa pengelolaan yang bijaksana, faktor-faktor ini dapat menjadi sumber potensi konflik baru. Karena itu, keberadaan tokoh adat, lembaga keagamaan, serta struktur pemerintahan lokal memiliki posisi vital sebagai penjaga norma dan fasilitator kerukunan. Peran mereka dalam memelihara norma sosial menjadi kunci agar interaksi tetap berlangsung konstruktif.

Berbagai momentum kolektif, seperti kegiatan pendidikan, pelestarian budaya, hingga pembangunan infrastruktur sosial, dimanfaatkan sebagai sarana mempererat solidaritas. Kegiatan bersama ini bukan hanya memperkuat interaksi, tetapi juga menjadi media pembelajaran sosial untuk menghargai perbedaan. Dalam perspektif pembangunan sosial, kegiatan bersama dapat dipandang sebagai *arena interaksi positif* yang mempercepat proses harmonisasi antar komunitas.

Secara keseluruhan, dinamika interaksi sosial di Nagari Banai menggambarkan proses yang kompleks, di mana konflik, adaptasi, dan integrasi berjalan beriringan. Meskipun terdapat ketegangan, masyarakat mampu menunjukkan kedewasaan sosial dengan memilih musyawarah sebagai jalan penyelesaian. Perkawinan antar etnis, kerja sama ekonomi, serta kegiatan sosial kolektif semakin memperkuat ikatan sosial yang terjalin. Dengan demikian, interaksi sosial yang sehat dan inklusif terbukti menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan harmoni sosial di Nagari Banai, sekaligus menjadi model bagaimana masyarakat majemuk dapat membangun kehidupan bersama yang damai.

Peran Tokoh dan Lembaga Adat

Tokoh adat dan lembaga adat menempati posisi fundamental dalam mengelola dinamika sosial-budaya masyarakat Nagari Banai, terutama dalam konteks interaksi antara warga transmigran Jawa dan komunitas lokal Minangkabau. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai simbol penjaga tradisi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang menjamin keberlanjutan norma dan nilai adat yang telah diwariskan lintas generasi. Kehadiran tokoh adat menjadi penyangga utama tatanan sosial, sebab keberadaan mereka memastikan bahwa perbedaan budaya dapat dijembatani dalam kerangka nilai-nilai lokal yang tetap terpelihara (Putra et al., 2021).

Salah satu figur adat yang sangat dihormati di Nagari Banai adalah niniak mamak, yang memiliki peran strategis sebagai wakil aspirasi rakyat sekaligus pelindung adat. Dalam tradisi Minangkabau, niniak mamak bukan hanya sekadar pemangku garis keturunan, melainkan juga penghubung antara masyarakat dengan struktur pemerintahan formal. Peran ini menjadikan mereka sebagai mediator efektif dalam meredakan gesekan sosial yang muncul, termasuk ketika terjadi ketegangan antara warga transmigran dengan masyarakat lokal. Dengan kharisma dan legitimasi adat yang dimiliki, niniak mamak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap penyelesaian masalah sejalan dengan norma adat dan keadilan sosial (Nofiardi, 2022).

Selain peran individual dari niniak mamak, keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga sangat signifikan. KAN berfungsi sebagai lembaga formal adat yang merumuskan, menegakkan, sekaligus mengawasi implementasi aturan adat di tingkat nagari. Lembaga ini menjadi benteng sosial yang memastikan semua warga baik penduduk asli maupun transmigran mematuhi tata nilai dan norma adat Minangkabau. Kehadiran KAN dengan otoritas kolektifnya menciptakan kerangka regulatif yang jelas, sehingga kehidupan sosial dapat berlangsung

dengan keteraturan yang menjunjung tinggi prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

Dalam proses adaptasi budaya, tokoh adat dan lembaga adat memainkan peran sebagai fasilitator integrasi. Mereka berfungsi membantu warga transmigran memahami adat istiadat Minangkabau yang berlaku di Nagari Banai, mulai dari tata cara bermusyawarah, praktik gotong royong, hingga penghormatan pada struktur kekerabatan matrilineal. Dengan adanya fasilitasi ini, warga transmigran dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas kulturalnya, sementara masyarakat lokal tetap merasa nilai-nilainya dihormati. Interaksi semacam ini memperkuat harmoni sosial karena membangun kesepahaman yang mendalam antar kelompok yang berbeda.

Tokoh adat juga memiliki peran vital dalam mengawal proses musyawarah ketika terjadi konflik sosial. Sebagai contoh, dalam kasus perselisihan mengenai penggunaan akses jalan oleh kendaraan besar pengangkut kayu yang melewati kawasan pemukiman transmigran, tokoh adat tampil sebagai mediator utama. Mereka menginisiasi dialog terbuka, memfasilitasi musyawarah, dan menuntun kedua pihak menuju solusi damai. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan praktis, tetapi juga memperkuat kepercayaan bahwa konflik dapat dikelola melalui mekanisme lokal yang menekankan prinsip mufakat dan keadilan.

Selain tokoh adat, peran tokoh agama atau alim ulama di Nagari Banai turut melengkapi struktur kepemimpinan sosial. Para ulama memberikan arahan moral dan spiritual yang memperkuat dimensi religius dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang universal, mereka menjadi figur penyeimbang yang mampu menenangkan masyarakat ketika terjadi ketegangan sosial, sekaligus memperkokoh landasan etis bagi interaksi lintas komunitas.

Lebih jauh, peran tokoh masyarakat dan generasi muda juga tidak dapat diabaikan. Mereka merupakan agen yang menggerakkan kegiatan sosial seperti gotong royong, pembangunan fasilitas umum, dan aktivitas kebudayaan bersama. Keterlibatan aktif mereka dalam ruang publik menciptakan jembatan sosial yang mempertemukan transmigran dengan masyarakat lokal dalam suasana kolektif yang egaliter. Dengan demikian, ikatan sosial tidak hanya dibangun di tingkat elit adat atau agama, melainkan juga di akar rumput masyarakat.

Fungsi lembaga adat juga menyentuh ranah pengawasan budaya. Lembaga adat bertugas menjaga agar nilai-nilai Minangkabau tidak tergerus oleh arus budaya luar, termasuk pengaruh dari transmigran. Melalui regulasi adat yang ketat, lembaga ini menegaskan batas-batas kultural yang harus dihormati semua pihak. Upaya ini bukan dimaksudkan untuk menutup diri, tetapi justru untuk memastikan bahwa proses integrasi berjalan dalam koridor penghormatan terhadap jati diri budaya lokal.

Pembentukan norma sosial yang akomodatif terhadap keberagaman budaya merupakan hasil nyata dari peran tokoh dan lembaga adat. Dengan pengawasan dan arahan mereka, norma baru yang lebih inklusif dapat lahir tanpa mengorbankan nilai dasar masyarakat Minangkabau. Norma ini menjadi pedoman kolektif yang memfasilitasi kehidupan bersama, menekankan persatuan, dan pada saat yang sama melestarikan kearifan lokal.

Keterlibatan aktif tokoh adat dan lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari menjadikan mereka sebagai pilar utama stabilitas sosial di Nagari Banai. Peran mereka tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik, melainkan juga mencakup fasilitasi pembangunan komunitas, penguatan modal sosial, dan pengembangan relasi harmonis antara transmigran dan

masyarakat lokal. Keberadaan mereka membuktikan bahwa kepemimpinan berbasis adat mampu berdampingan dengan sistem modern dalam menjawab tantangan masyarakat multikultural.

Secara keseluruhan, tokoh dan lembaga adat di Nagari Banai memainkan peran esensial dalam mengelola kompleksitas sosial yang lahir dari program transmigrasi. Mereka menjadi jembatan yang meminimalisasi konflik, memperkuat integrasi, serta menjaga kelangsungan tradisi dan norma adat sebagai identitas kolektif masyarakat. Dengan kata lain, harmoni sosial yang tercipta di Nagari Banai tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar tokoh adat dan lembaga adat sebagai aktor kultural sekaligus mediator sosial.

Faktor Pendukung dan Kendala Pengharmonisasian

Harmonisasi sosial antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Nagari Banai merupakan sebuah proses dinamis yang terbentuk melalui interaksi panjang, melibatkan berbagai faktor pendukung sekaligus kendala yang saling berkelindan. Fenomena ini tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis sebagai suatu sistem sosial yang kompleks, di mana nilai-nilai budaya, agama, ekonomi, dan struktur adat bekerja bersama membentuk pola hubungan yang unik. Dengan demikian, kajian mengenai faktor-faktor pendukung dan kendala dalam harmonisasi sosial ini menjadi penting untuk melihat bagaimana masyarakat mampu membangun kehidupan bersama yang relatif harmonis meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda.

Salah satu pilar utama yang menopang harmonisasi sosial di Nagari Banai adalah kesamaan keyakinan agama Islam yang dianut oleh hampir seluruh masyarakat, baik dari kelompok transmigran maupun masyarakat lokal. Kesamaan identitas religius ini berfungsi sebagai fondasi moral dan spiritual yang tidak hanya memperkuat ikatan persaudaraan, tetapi juga menciptakan landasan nilai yang sama dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan adanya kesamaan tersebut, hubungan antarwarga lebih mudah terjalin karena mereka memiliki panduan normatif yang serupa dalam memandang kehidupan, etika, dan tata perilaku (Zulkani, 2025).

Lebih jauh, aktivitas keagamaan kolektif seperti pengajian, shalat berjamaah, serta perayaan hari besar Islam berperan sebagai arena integrasi sosial yang strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut menyediakan ruang interaksi lintas etnis di mana warga dapat berpartisipasi secara setara tanpa memandang asal-usul kulturalnya. Intensitas pertemuan dalam kegiatan keagamaan ini memperkuat kohesi sosial, memupuk solidaritas, serta melahirkan rasa kebersamaan yang mengikis batas-batas etnisitas. Dalam perspektif teori interaksi sosial, aktivitas keagamaan bersama dapat dipandang sebagai mekanisme “bridging social capital” yang mempertemukan kelompok berbeda melalui nilai dan pengalaman yang dibagi bersama.

Selain faktor keagamaan, peran tokoh adat dan lembaga adat di Nagari Banai menjadi instrumen penting dalam memelihara harmoni sosial. Tokoh adat berfungsi sebagai figur otoritatif yang tidak hanya menjaga keberlangsungan nilai adat Minangkabau, tetapi juga berperan sebagai mediator dalam mengintegrasikan warga transmigran ke dalam kehidupan sosial lokal. Dengan kebijaksanaan dan legitimasi sosial yang dimilikinya, tokoh adat mampu menengahi perbedaan serta mengarahkan masyarakat untuk tetap menjunjung norma adat yang inklusif. Peran ini selaras dengan konsep “cultural brokerage,” yakni kapasitas tokoh masyarakat dalam menjembatani dua kebudayaan yang berbeda untuk mencapai titik temu.

Praktik sosial yang memperkuat proses integrasi adalah tradisi “*berinduk*,” di mana warga transmigran Jawa mengambil suku melalui jalur perempuan masyarakat lokal Minangkabau. Melalui mekanisme ini, warga pendatang secara adat diakui sebagai bagian dari kekerabatan lokal, yang sekaligus memperkuat legitimasi sosial mereka di tengah komunitas. Praktik tersebut bukan sekadar simbol penerimaan budaya, melainkan juga menjadi instrumen struktural yang mengikat dua komunitas melalui hubungan genealogis, sehingga menghasilkan integrasi yang lebih dalam dan berkelanjutan (Darussalam, 2025).

Faktor ekonomi turut menjadi katalisator penting dalam memperkuat harmonisasi sosial. Kegiatan bersama dalam sektor pertanian dan perkebunan telah menciptakan pola kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua kelompok. Interdependensi ekonomi ini bukan hanya mendorong peningkatan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial karena warga dipertemukan dalam kepentingan praktis yang sama. Dalam kerangka teori fungsionalisme, kerja sama ekonomi dapat dilihat sebagai mekanisme integratif yang menyatukan kelompok sosial melalui distribusi peran dan fungsi yang saling melengkapi.

Interaksi lintas generasi juga memberikan kontribusi signifikan bagi terwujudnya harmonisasi. Anak-anak dari kedua kelompok tumbuh bersama dalam lingkungan pendidikan formal yang sama, sehingga secara alami mereka membentuk identitas kolektif baru yang melampaui sekat etnis. Pendidikan di sini berfungsi sebagai wahana sosialisasi budaya dan nilai yang memperluas penerimaan, serta menanamkan semangat kesetaraan sejak dini. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan, tetapi juga sebagai ruang reproduksi sosial budaya yang melanggengkan kohesi sosial di masa depan.

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, dinamika sosial di Nagari Banai tidak terlepas dari kendala-kendala tertentu. Perbedaan bahasa dan adat istiadat kerap menghadirkan hambatan dalam komunikasi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pemahaman sosial antar kelompok. Situasi ini menuntut adanya upaya adaptasi yang berkelanjutan agar perbedaan kultural tidak berkembang menjadi potensi konflik. Adaptasi tersebut membutuhkan kesabaran, keterbukaan, serta kesediaan untuk saling belajar dari kedua belah pihak.

Selain kendala kultural, terdapat pula persoalan ketimpangan ekonomi yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Jika disparitas kesejahteraan tidak dikelola secara bijaksana, maka ketidakpuasan sosial dapat muncul dan berkembang menjadi konflik yang mengancam stabilitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus disertai dengan kebijakan yang inklusif agar tidak menimbulkan segregasi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Salah satu contoh nyata kendala tersebut adalah terjadinya konflik ringan terkait penggunaan akses jalan oleh kendaraan besar pengangkut kayu yang melewati pemukiman warga transmigran. Insiden ini menimbulkan ketegangan karena mengganggu aktivitas sehari-hari warga dan memunculkan perasaan tidak nyaman. Kasus ini memperlihatkan bagaimana aspek pengelolaan ruang sosial dapat menjadi sumber friksi jika tidak diatur secara adil dan partisipatif.

Namun demikian, penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah berhasil meredakan ketegangan yang ada. Musyawarah, yang difasilitasi oleh tokoh adat dan lembaga masyarakat, membuktikan diri sebagai instrumen resolusi konflik yang efektif. Melalui dialog terbuka, semua pihak dapat menyampaikan aspirasi secara setara, sehingga tercapai

kesepakatan yang dapat diterima bersama. Mekanisme ini sekaligus mempertegas pentingnya prinsip deliberatif dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat plural.

Proses penyelesaian konflik melalui musyawarah bukan hanya menyelesaikan persoalan praktis, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat rasa saling percaya, tanggung jawab kolektif, serta stabilitas sosial jangka panjang. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai instrumen adat, tetapi juga sebagai modal sosial yang menjaga kohesi komunitas di tengah keberagaman.

Kesimpulannya, harmonisasi sosial di Nagari Banai terbentuk dari perpaduan antara faktor pendukung dan kendala yang menciptakan dinamika sosial yang kaya dan kompleks. Kesamaan nilai agama, peran tokoh adat, kerja sama ekonomi, praktik adat “berinduk,” serta interaksi lintas generasi menjadi fondasi penting bagi integrasi sosial. Di sisi lain, kendala berupa perbedaan budaya, bahasa, dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Keberhasilan harmonisasi sosial pada akhirnya ditentukan oleh komitmen kolektif masyarakat, ditopang oleh peran tokoh adat dan mekanisme musyawarah yang menjaga toleransi, mengelola konflik secara konstruktif, dan membangun kehidupan sosial yang inklusif serta berkelanjutan.

Strategi Penguatan Harmonisasi Sosial

Penguatan harmonisasi sosial antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Nagari Banai menuntut adanya strategi yang komprehensif, terencana, dan berkelanjutan. Strategi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjembatani perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan sosial, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan potensi kerja sama yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi tidak dipahami semata sebagai kondisi damai yang pasif, melainkan sebagai sebuah proses aktif yang terus diperkuat melalui interaksi sosial, pengelolaan konflik, serta pembentukan norma kolektif yang inklusif.

Salah satu strategi mendasar adalah peningkatan komunikasi dan interaksi lintas kelompok melalui forum musyawarah, kegiatan sosial bersama, dan ruang dialog terbuka. Melalui wadah ini, warga transmigran dan masyarakat lokal memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi, mendiskusikan persoalan, serta mencari solusi bersama. Forum musyawarah menjadi mekanisme deliberatif yang tidak hanya menyelesaikan permasalahan praktis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokratis, membangun rasa saling menghargai, dan menumbuhkan kepercayaan antarkelompok (Irmandes, 2025).

Selain forum komunikasi, kegiatan keagamaan bersama memiliki peranan signifikan dalam memperkuat ikatan sosial. Tradisi pengajian, doa bersama, hingga perayaan hari besar keagamaan berfungsi sebagai arena interaksi yang melampaui sekat etnis. Dalam konteks ini, nilai-nilai spiritual Islam yang dianut bersama berfungsi sebagai “common platform” yang mempererat solidaritas, menumbuhkan rasa persaudaraan, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput. Kegiatan keagamaan tidak hanya dipandang sebagai ritual religius, tetapi juga sebagai instrumen integrasi sosial yang efektif (Zulkani, 2025).

Pemberdayaan tokoh adat dan lembaga adat sebagai mediator menjadi strategi yang tidak kalah penting. Tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat untuk mengarahkan proses integrasi, sementara lembaga adat berperan menjaga konsistensi nilai dan norma adat. Dalam kapasitasnya, tokoh adat tidak hanya menjadi penengah ketika konflik muncul, tetapi juga

berfungsi sebagai fasilitator budaya yang mengintegrasikan nilai Jawa dan Minangkabau agar tercipta harmoni. Kehadiran lembaga adat sebagai penjaga tradisi memperkuat kohesi komunitas dan memberikan legitimasi struktural bagi integrasi sosial.

Bidang pendidikan memegang posisi strategis dalam memperkuat harmonisasi sosial. Pendidikan multikultural yang dijalankan melalui sekolah menjadi ruang pertemuan generasi muda dari dua komunitas yang berbeda. Interaksi dalam lingkungan pendidikan mendorong tumbuhnya sikap saling memahami, menghormati, dan menerima keberagaman sejak dini. Lebih jauh, sekolah berperan sebagai agen sosialisasi nilai kebersamaan, sekaligus sebagai arena reproduksi sosial yang menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi dan kohesi sosial di masa depan.

Praktik adat “*berinduk*” juga menjadi strategi khas yang menguatkan ikatan sosial antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal Minangkabau. Melalui mekanisme ini, warga transmigran secara adat diakui sebagai bagian dari sistem kekerabatan lokal, sehingga memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Praktik berinduk tidak hanya memperkuat hubungan genealogis, tetapi juga mempertegas identitas kolektif yang inklusif, di mana warga pendatang tidak lagi dipandang sebagai “orang luar,” melainkan sebagai bagian integral dari komunitas lokal.

Faktor ekonomi pun tidak dapat diabaikan dalam membangun harmonisasi. Kerja sama dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi produktif lain menciptakan hubungan saling ketergantungan yang bersifat fungsional. Ketergantungan ekonomi ini mendorong terjalinnya relasi sosial yang erat sekaligus mengurangi potensi konflik. Dalam kerangka teori fungsionalisme, interaksi ekonomi dipandang sebagai mekanisme integratif yang memperkuat jaringan sosial dan meneguhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Peran pemerintah daerah dan lembaga terkait juga menjadi bagian dari strategi integratif. Penyediaan fasilitas infrastruktur sosial dan ekonomi, seperti ruang pertemuan, jalan akses bersama, sarana pendidikan, dan program pembangunan kolaboratif, dapat memperluas ruang interaksi antarwarga. Dukungan kelembagaan dari pemerintah menegaskan bahwa harmonisasi sosial bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tetapi juga menjadi agenda kebijakan publik yang harus difasilitasi secara berkelanjutan.

Selain pembangunan fisik, program pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas warga, baik transmigran maupun masyarakat lokal, menjadi strategi yang penting. Dengan adanya peningkatan kapasitas individu, tercipta kesetaraan ekonomi yang dapat meminimalisasi kecemburuan sosial. Peningkatan kualitas hidup melalui pemberdayaan ekonomi juga akan memperkuat solidaritas, sebab setiap kelompok merasa diuntungkan dan tidak ditinggalkan dalam arus pembangunan.

Strategi berikutnya adalah memperkuat mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa konflik, seperti terkait akses jalan, dapat dikelola secara damai melalui dialog terbuka. Mekanisme musyawarah bukan hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, memperkuat kepercayaan sosial, serta menjaga stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, musyawarah dapat dianggap sebagai pilar utama resolusi konflik berbasis kearifan lokal (Andi, 2025).

Penguatan norma sosial dan etika bersama yang menghormati keberagaman juga menjadi bagian integral dari strategi harmonisasi. Norma ini ditegakkan melalui pendidikan sosial, internalisasi adat, serta peran media komunikasi lokal. Dengan adanya pedoman normatif yang disepakati bersama, masyarakat memiliki acuan yang jelas dalam mengatur perilaku sosial sehingga interaksi dapat berlangsung secara tertib, saling menghormati, dan inklusif.

Secara keseluruhan, strategi penguatan harmonisasi sosial di Nagari Banai bersifat multidimensional, melibatkan aspek agama, adat, pendidikan, ekonomi, serta peran pemerintah dan masyarakat. Pendekatan inklusif yang menekankan integrasi nilai lokal dan pendatang, penguatan kapasitas sosial-ekonomi, serta penyelesaian konflik berbasis musyawarah merupakan formula yang relevan untuk membangun komunitas yang kohesif, damai, dan produktif. Dengan strategi yang terencana dan berkelanjutan, Nagari Banai dapat menjadi model harmonisasi sosial di wilayah transmigrasi dan masyarakat multikultural lainnya di Indonesia.

KESIMPULAN

Dinamika harmonisasi sosial antara warga transmigran Jawa dan masyarakat lokal di Nagari Banai menunjukkan proses adaptasi yang kompleks namun produktif, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan sistem sosial dikelola melalui interaksi, kerja sama, serta mekanisme adat dan agama. Kesamaan keyakinan Islam, praktik adat seperti *berinduk*, kegiatan ekonomi bersama, serta peran sentral tokoh adat, ulama, dan lembaga masyarakat menjadi faktor utama pengikat harmoni. Meski masih terdapat kendala berupa perbedaan adat, bahasa, dan ketimpangan ekonomi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mediasi berbasis kearifan lokal. Dengan strategi komunikasi terbuka, pendidikan multikultural, serta pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan, harmonisasi sosial di Nagari Banai dapat terus diperkuat sebagai model inklusif bagi integrasi masyarakat multikultural di Indonesia.

REFERENCE

- Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Reading/Addison-Wesley.
- Andi. (n.d.). *Mekanisme Penyelesaian Konflik*. Wawancara Pribadi.
- Anggraini, R. (2019). Integrasi Sosial Masyarakat Multietnik Di Nagari Sitiung Kabupaten Dhamasraya. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 5(2), 115–132. <https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.115-132.2019>
- Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology*, 46(1), 5–34.
- Darussalam, D. P. S. (n.d.). *Peran Ninik Mamak*. Wawancara Pribadi.
- Firma, A. (n.d.). *Hubungan Antar Masyarakat*. Wawancara Pribadi.

- Irmandes. (n.d.). *Geografis Nagari Banai*. Wawancara Pribadi.
- May, E. (2006). Potret 3 Desa Transmigrasi Orang Jawa: Studi Kasus di Desa Tongar, Koja, dan Desa Baru Pasaman Sumatera Barat. *Laporan Penelitian*.
- Nofiardi, N. (2022). *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat*. LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan Penerbit Fahmi Karya.
- Nova, Y. (2016). Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1927>
- Novendra, A. (n.d.). *Kultur Budaya Jawa di Nagari Banai*. Wawancara Pribadi.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and schuster.
- Putra, I., Indraddin, I., & Miko, A. (2021). Penolakan Komunitas Lokal Nagari Padang Tarok Terhadap Kedatangan Transmigran Suku Anak Dalam. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(2), 175–183. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p175-183.2021>
- RAMADANI, H. Z. (n.d.). *MEMBANGUN TATANAN SOSIAL BARU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL*.
- Rustiadi, E., & Junaidi, J. (2011). *Transmigrasi dan pengembangan wilayah*.
- Sumatera, J., Karang, U., Utara, P., & Syaputra, R. (1993). *Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta*. 4(5), 6–7.
- Suyatno. (n.d.). *Harmonisasi Warga Transmigran*. Wawancara Pribadi.
- Zulkani. (n.d.). *Kegiatan Keagamaan di Nagari Banai*. Wawancara Pribadi.

